

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kurun waktu 1997-1998 Indonesia pernah dilanda Krisis ekonomi yang hebat, kejadian tersebut merupakan gejolak ekonomi yang berat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal ini berdampak pada banyaknya lembaga keuangan yang mengalami kesulitan likuiditas, khususnya lembaga perbankan konvensional. Hal ini terjadi karena nilai suku bunga yang sangat tinggi pada saat itu, sehingga berpengaruh terhadap biaya modal tinggi yang akhirnya mengakibatkan merosotnya usaha produksi bagi pelaku ekonomi. Sedangkan selama krisis ekonomi tersebut berlangsung, system perbankan diharuskan tetap memberikan imbalan kepada deposan sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku dipasar.

Berbeda halnya dengan Perbankan Syariah yang selama krisis ekonomi berlangsung, masih dapat memenuhi kinerja yang baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal tersebut dapat dipahami mengingat Perbankan Syariah dalam melakukan operasionalnya tidak mengacu pada suku bunga melainkan pada system bagi hasil. Dalam konsep islam sendiri, islam menjaga keseimbangan antara sector riil dengan sector moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak lepas dari pertumbuhan sector riil yang dibiayainya. Dengan kata lain, kinerja perbankan syariah ditentukan oleh kinerja sector riil. Dengan demikian, Perbankan Syariah dapat menjalankan kegiatannya tanpa terganggu dengan kenaikan tingkat suku bunga yang berlaku.

Eksistensi perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi pada periode tersebut membawa perbankan syariah menjadi system yang diminati oleh berbagai lapisan masyarakat dan bertahan hingga saat ini. Di Indonesia sendiri berdirinya bank syariah dipelopri oleh bank Muamalat yang berdiri pada tahun 1997. Munculnya bank syariah diharapkan mampu mendorong dan mempercepat

kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan financial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip syariah.

Eksistensi bank syariah pada awalnya didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan system perbankan yang terhindar dari praktek bunga (riba), perjudian (maysir) dan ketidakpastian (gharar) dan praktek-praktek lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (haram). Selain itu perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan umat muslim untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariah, serta sebagai respon terhadap fenomena krisis berulang yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral, yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lain. (roadmap perbankan syariah: 2015-2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada dasarnya fungsi dan tugas bank syariah dan bank konvensional tidak berbeda. Tetapi yang menjadi ciri khas bank syariah yaitu tidak mengenal sistem bunga yang dianggap riba, sehingga profit yang didapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri (Antonio, 2001).

Selain itu dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah tidak hanya mampu mendorong serta mempercepat kemajuan ekonomi. Selain itu akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,

yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Bahkan apabila ekonomi syariah diterapkan secara maksimal akan membawa Indonesia menjadi Negara yang kuat secara ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah yang sesuai Al-Quran & Hadist. Berikut ini merupakan tabel perkembangan jumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia sejak tahun 2013 – 2015.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah BUS & UUS di Indonesia Tahun 2013 -2016

Th.	JENIS BANK	JUMLAH BANK
2013	Bank Umum Syariah	11
	Unit Usaha Syariah	23
2014	Bank Umum Syariah	12
	Unit Usaha Syariah	22
2015	Bank Umum Syariah	12
	Unit Usaha Syariah	22

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan perbankan syariah baik dalam bentuk Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah dari tahun 2013-2015. Pada tahun 2013 Unit Usaha Syariah berjumlah 23 bank yang pada tahun 2014 mengalami pengurangan jumlah bank menjadi 22 Unit Usaha Syariah hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Berbeda halnya dengan Unit Usaha Syariah yang mengalami pengurangan jumlah bank, Bank Umum syariah di

Indonesia yang pada tahun 2013 berjumlah 11 unit justru mengalami peningkatan sejak tahun 2014 – 2015 yang berjumlah 12 unit.

Secara umum perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi dari sisi ukuran industry perbankan dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih relative kecil ketika dibandingkan dengan industry perbankan dan keuangan umum, yang terlihat dari pangsa pasar maupun rasio pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang masih kecil.

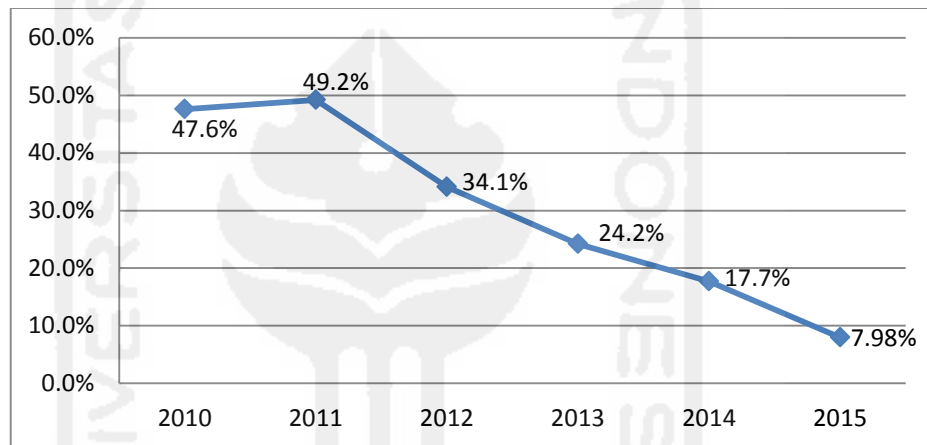
Untuk mendukung perkembangan perbankan syariah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur tentang perbankan syariah, beberapa diantaranya UU No.7 Th.1992 yang diamandemen dengan UU No.10. Th.1998 dan UU No.23 Th.1999. Biro perbankan syariah-Bank Indonesia sejak tahun 2001 juga telah menyusun kajian dan cetak biru pengembangan perbankan syariah. Adapun cetak biru ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia di masa yang akan datang.

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.(Bank Indonesia)

Dalam cetak biru yang terakhir dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2007 - 2015 terdapat 6 poin strategi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Adapun salah satu poin tersebut berisikan terciptanya system perbankan syariah yang kompetitif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI membuat strategi yaitu tercapainya pangsa pasar perbankan syariah sebesar 15% pada akhir tahun 2015 (Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2007-2015).

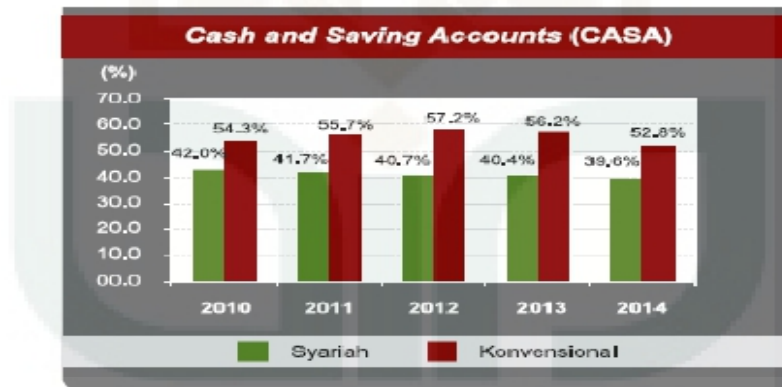
Selain membentuk strategi untuk menargetkan pangsa pasar perbankan syariah, berdasarkan keterangan Mulya E. Siregar, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016), saat ini aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp. 333 triliun dari 12 bank syariah yang ada saat ini. OJK sendiri menargetkan rasio aset bank syariah dibanding total aset perbankan nasional bisa setidaknya mencapai 10% di tahun 2019. Untuk semakin memacu pertumbuhan aset, OJK mengubah perhitungan rasio dari sebelumnya dengan aset total bank syariah dengan total aset perbankan, diubah menjadi rasio aset bank syariah dengan aset bank induknya.

Gambar 1.2 Perkembangan Asset Perbankan Syariah



Sumber : Bank Indonesia 2015

Namun dalam perkembangannya, strategi-strategi tersebut belum mampu meningkatkan pangsa pasar maupun meningkatkan aset perbankan syariah di Indonesia sesuai yang diharapkan. Beberapa penyebab belum tercapainya strategi tersebut adalah tingkat efisiensi perbankan syariah yang masih rendah serta struktur pendanaan bank syariah yang secara umum belum se-efisien dibanding Bank Umum Konvensional (BUK). Hal ini dapat terlihat dari *Cash and Saving Account (CASA)* perbankan syariah yang lebih rendah dibanding dengan perbankan konvensional. (Roadmap Perbankan Syariah di Indonesia Th.2015 – 2019).



Gambar 1.1 Cash and Saving Account Bank Umum Syariah dan Konvensional

Sumber: Bank Indonesia

Dalam grafik tersebut terlihat bahwa pangsa pasar perbankan syariah belum mencapai target sesuai yang diharapkan dalam cetak biru strategi pengembangan perbankan syariah. Namun jika dilihat dari jumlah asset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat setiap periodenya. Berdasarkan pemaparan tersebut adanya ketidaksesuaian antara kondisi pasar perbankan syariah dengan neraca keuangannya menjadikan pengukuran tingkat efisiensi perbankan syariah semakin dibutuhkan.

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja sebuah organisasi, dalam hal ini adalah perbankan syariah. Dalam system pengukurannya, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana bank dapat menghasilkan *output* yang maksimum dengan *input* yang minimum atau bagaimana menghasilkan tingkat *output* yang optimum dengan tingkat *input* yang ada. Dalam mengukur tingkat efisiensi, terdapat 2 (pendekatan) (Hadad, Santoso, Mardaguragha, Ilyas, 2003: 2). Pertama, melalui pendekatan parametric yaitu *Stochastic Frontier Approach (SFA)* dan *Distribution Free Approach (DFA)*. Kedua, melalui pendekatan non parametric yaitu *Data Envelopment Approach (DEA)* dan *Free Disposable*. Penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis (DEA)* dalam mengukur tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia).

Dari uraian latar belakang diatas. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti “**Analisis Efisiensi Bank Muamalat, BNI Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah periode 2013-2015.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa :

- 1) Mengetahui bank yang memiliki efisiensi relative terbaik diantara Bank Muamalat, BNI Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efisiensi Bank Muamalat Syariah, BNI Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah tahun 2013-2015 dengan menggunakan metode *Data Envelopment Approach (DEA)*

1.4 Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis melakukan pembatasan masalah. Dalam hal ini Bank Syariah yang diteliti adalah hanya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia, tidak termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian ini hanya dilakukan pada periode tahun 2013-2015. Menggunakan data laporan keuangan pada website OJK.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

- 1) Bagi Bank Syariah, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah di Indonesia agar dapat menjalankan kinerjanya lebih baik.
- 2) Bagi OJK dan Pemerintah, memberikan informasi yang dapat digunakan dalam mengambil kebijakan untuk perbankan syariah di Indonesia.
- 3) Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya, Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan dan pengalaman mengenai perbankan syariah bagi peneliti maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang perbankan syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengurai tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengurai landasan teori-teori yang sesuai, penelitian terdahulu dan melandasi penelitian yang digunakan penulis sehingga dapat mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengurai tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan data penelitian yaitu kondisi kemiskinan, dan pengangguran, menyajikan hasil penelitian, analisa data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bagian penutup meliputi kesimpulan dan implikasi yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN